

# Dari partisipasi ke polarisasi: dampak media sosial terhadap demokrasi di Indonesia

Dhafani Rizky Kurniawan

Program Studi Ekonomi/manajemen, Universitas UIN Malang.  
e-mail : Dhafanio5@gmail.com

## Kata Kunci:

Media sosial, demokrasi, partisipasi politik, polarisasi, literasi digital

## Keywords:

Social media, democracy, political participation, polarization, digital literacy

## ABSTRAK

Media sosial berperan penting dalam kemajuan demokrasi di Indonesia, karena mampu meningkatkan partisipasi publik dalam arena politik. Berbagai platform seperti Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, mengikuti perkembangan isu politik, dan mengawasi tindakan pemerintah dengan lebih transparan. Media sosial juga mempercepat distribusi informasi politik, memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah akses informasi dan memperdalam pemahaman politik. Di samping itu, generasi muda menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berdialog, menjalankan kampanye sosial, serta memantau

pelaksanaan pemilu sehingga demokrasi menjadi lebih terbuka bagi semua. Namun demikian, keberadaan media sosial juga menimbulkan konsekuensi negatif, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, propaganda politik, dan perpecahan sosial yang bisa mengganggu kestabilan demokrasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital, etika komunikasi yang baik, pengawasan terhadap informasi yang tidak benar, serta pendidikan demokrasi agar penggunaan media sosial dapat dilakukan dengan bijaksana. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan platform digital, media sosial dapat berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang sehat, terbuka, dan bermartabat di Indonesia.

## ABSTRACT

Social media has emerged as a crucial element in the advancement of democracy in Indonesia as it promotes greater public involvement in political affairs. Platforms including Instagram, X, Facebook, TikTok, and YouTube offer opportunities for individuals to voice their views, stay informed about political matters, and observe government actions with increased transparency. Additionally, social media facilitates the rapid dissemination of political content, simplifying the process for individuals to obtain information and enhance their political consciousness. Furthermore, the youth utilize social media to engage in discussions regarding political topics, carry out social advocacy, and oversee electoral processes, thereby contributing to a more inclusive democratic framework. Nevertheless, social media also has detrimental effects, such as the propagation of false information, hate speech, political manipulation, and societal division, which can pose risks to the stability of democracy. Consequently, there is a need for digital literacy, ethical communication practices, oversight of misleading information, and educational initiatives on democracy to ensure the responsible usage of social media. By fostering collaboration among the community, governmental bodies, and digital platforms, social media can aid in building a healthy, transparent, and respectful democratic system in Indonesia.

## Pendahuluan

Evolusi teknologi informasi, khususnya munculnya platform media sosial, telah secara signifikan mengubah paradigma komunikasi masyarakat di berbagai dimensi



keberadaan, terutama dalam domain politik. Media sosial telah muncul sebagai arena baru bagi individu untuk mengartikulasikan perspektif politik mereka secara publik, cepat, dan luas. Meskipun demikian, bersamaan dengan proliferasi keterlibatan politik online, ada fenomena polarisasi politik, yang ditandai dengan bifurkasi yang jelas dalam kontinum politik, yang membagi masyarakat ke dalam faksi-faksi yang memiliki ideologi yang menentang secara fundamental. Fenomena polarisasi politik dapat diperburuk oleh algoritma media sosial yang memperkuat kecenderungan pengguna terhadap bias konfirmasi, mengarahkan individu untuk secara dominan menghadapi sudut pandang yang selaras dengan keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Hal ini mengakibatkan disintegrasi opini publik dan memicu konflik wacana yang nyata dalam lingkup digital. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat jelas selama peristiwa politik penting seperti Pemilu 2014 dan 2019, di mana media sosial menjadi medan pertempuran untuk konfrontasi ideologis yang intens, sering disertai dengan retorika vitriolik dan penyebaran informasi yang salah.

Berdasarkan pengamatan mengenai dinamika yang melekat dalam platform media sosial dan analisis komprehensif dari berbagai kasus peradilan yang berkaitan dengan prinsip kebebasan berekspresi, banyak masalah terkait telah digambarkan. Tantangan yang sangat kompleks dalam praktik penegakan hukum telah muncul di tengah meningkatnya polarisasi politik yang diamati di Indonesia. Masalah utama yang bermanifestasi adalah konvergensi dan interpretasi multifaset dari peraturan yang mengatur ekspresi yang disebarluaskan melalui media sosial. Ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE Act), terutama pasal-pasal yang membahas pencemaran nama baik dan penghinaan, sering menyebabkan penyebaran informasi inflamasi yang dianggap sebagai formalitas belaka karena tidak adanya batasan yang terdefinisi dengan baik. Ambiguitas ini akibatnya menghasilkan interpretasi yang berbeda di antara lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya menumbuhkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Fenomena polarisasi politik memperburuk kondisi yang ada. Dalam konteks kerapuhan ideologis masyarakat, ekspresi yang mengartikulasikan kritik terhadap individu tertentu atau kelompok tertentu sering ditafsirkan sebagai serangan pribadi atau bahkan diklasifikasikan sebagai contoh ujaran kebencian. Dalam banyak kasus, pejabat penegak hukum telah menunjukkan bias yang tidak netralitas, di mana pelaporan ekspresi politik yang dianggap kontroversial sering dipercepat jika individu pelapor memiliki hubungan dengan mereka yang berkuasa. Sebaliknya, ekspresi analog yang berasal dari faksi yang berlawanan tidak menimbulkan reaksi hukum yang sepadan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memperkuat keyakinan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan, bukan berfungsi sebagai mekanisme keadilan. Keadaan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada meningkatnya fenomena sensor diri dalam masyarakat. Banyak pengguna platform media sosial, termasuk aktivis, jurnalis, dan cendekiawan, menunjukkan keengganan untuk mengartikulasikan perspektif atau kritik mereka di forum publik karena kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi. Akibatnya, arena publik digital menyaksikan penindasan wacana yang seharusnya menjadi bagian integral dari struktur keberadaan demokrasi. Selain itu, kekurangan literasi hukum dan digital

memperburuk situasi. Sejumlah besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang demarkasi antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum, sehingga memfasilitasi keterlibatan dalam perilaku yang bertentangan dengan standar hukum, baik sengaja atau karena ketidaktahuan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum di platform media sosial belum dapat dijalankan dengan adil, seimbang, dan tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk kebebasan berpendapat. Pihak negara, melalui lembaga penegak hukum, sering memanfaatkan berbagai alat hukum seperti Undang-Undang ITE untuk menangani konten yang dianggap melanggar. Namun, penerapan hukum ini sering dikritik karena dianggap bertentangan, tidak konsisten, dan berpotensi membahayakan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Untuk menangani masalah tumpang tindih peraturan, inkonsistensi dalam penerapan hukum, dan risiko terhadap kebebasan untuk berbicara yang muncul akibat polarisasi politik di media sosial, perlu ada pendekatan yang beragam yang mencakup perbaikan hukum, peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum, dan penguatan pemahaman digital masyarakat.

## **Pembahasan**

### **Dampak Media sosial dalam partisipasi demokrasi**

Media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia dengan memperluas peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam arena politik. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan pandangan, memberikan kritik terhadap tindakan pemerintah, dan mengikuti perkembangan isu politik dengan cepat dan transparan. Kehadiran platform seperti Instagram, X, Facebook, TikTok, dan YouTube membuat komunikasi politik lebih tersentuh oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang aktif memanfaatkan teknologi digital. Situasi ini menyebabkan proses demokrasi menjadi lebih inklusif karena masyarakat tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyebar informasi dan pengawas dalam pelaksanaan pemerintahan. Di samping itu, media sosial juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik warga melalui penyebaran informasi mengenai pemilu, kebijakan publik, dan hak-hak rakyat sehingga masyarakat dapat membuat pilihan politik yang lebih menyadari dan berdasarkan informasi (Nasrullah, 2021). Perubahan di dunia media sosial mengubah cara orang berkomunikasi tentang politik di Indonesia. Sebelum munculnya media sosial, berita politik terutama disiarkan melalui televisi, radio, dan koran. Namun kini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi politik secara langsung melalui internet dan media sosial tanpa harus menunggu laporan dari sumber berita tradisional. Ini mempercepat dan memperluas penyebaran informasi. Masyarakat juga memiliki kebebasan lebih untuk menyampaikan pandangan mereka dan berdiskusi tentang isu-isu politik yang sedang berlangsung. Kebebasan berekspresi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi karena setiap individu memiliki peluang yang

setara untuk menyuarakan keinginan dan mempengaruhi pandangan publik dalam ranah politik (Indrawan & Ilmar, 2021).

Di zaman globalisasi ini, media sosial memiliki peranan yang krusial dalam segala bentuk kegiatan sosial, termasuk dalam konteks politik dari sudut pandang demokrasi. Media sosial berfungsi sebagai platform publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, seperti opini, saran, dan kritik mengenai operasional lembaga demokrasi. Beberapa responden yang diwawancarai mengaku pernah terlibat di media sosial terkait isu-isu demokrasi, misalnya melalui kolom komentar. Namun, sejumlah orang lebih memilih untuk terlibat secara langsung atau secara sukarela tanpa menggunakan media sosial. Demokrasi menjadi dasar bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pengawasan dan diskusi mengenai peraturan. Selain itu, peningkatan pemanfaatan media sosial dan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan remaja, jelas telah memperkuat keterlibatan langsung, khususnya di kalangan generasi milenial (Masyita, 2025).

Di sisi lain, platform media sosial pun memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas demokrasi. Beragam gerakan sosial, kampanye politik, dan dialog publik muncul melalui media sosial karena teknologi digital memungkinkan komunikasi berlangsung dengan lebih cepat, luas, dan efektif. Media sosial juga mempermudah warga untuk mengorganisir aksi sosial dan menyampaikan harapan kepada pemerintah tanpa ada batasan jarak dan waktu. Partai politik, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menjalin komunikasi dengan publik serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Ini menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi secara efektif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia (Setiawan, 2022). Media sosial memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Kaum muda yang akrab dengan teknologi digital lebih sering memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai politik, mengikuti perkembangan pemilu, serta berdiskusi tentang berbagai isu sosial dan pemerintahan. Banyak generasi muda memanfaatkan platform media sosial untuk meluncurkan kampanye sosial, mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap isu-isu tertentu, dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu agar berlangsung dengan transparan dan berkeadilan. Hadirnya media sosial membuat generasi muda lebih berani untuk menyuarakan pendapat dan lebih peka terhadap keadaan politik di tanah air. Ini menunjukkan bahwa media sosial berpotensi menciptakan ruang demokrasi yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam arena politik (Munzir, Asmawi, & Zetra, 2019).

Namun, pemanfaatan platform media sosial dalam konteks demokrasi juga memunculkan berbagai efek negatif yang harus diperhatikan dengan serius. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, propaganda, dan polarisasi sosial sering kali terjadi melalui platform ini, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan merusak kesatuan masyarakat. Fakta yang mungkin tidak akurat sering kali menyebar dengan cepat dan memengaruhi cara pandang publik tanpa adanya

proses verifikasi yang jelas. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak tepat bisa menyebabkan konflik antara kelompok masyarakat karena perbedaan sudut pandang politik. Situasi ini mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan bagi kehidupan demokrasi. Oleh karenanya, diperlukan literasi digital, sikap kritis, dan tanggung jawab kolektif dalam menggunakan media sosial agar teknologi bisa digunakan secara konstruktif untuk mendukung demokrasi yang sehat, transparan, dan beradab di Indonesia (Pratama & Hidayat, 2023).

### **Dampak Negatif dan Positif media sosial**

Media sosial memiliki kontribusi positif pada demokrasi karena dapat memperluas dan mempercepat partisipasi politik masyarakat. Melalui platform digital yang beragam, individu dapat menyampaikan pandangan, mengikuti perkembangan politik, hingga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara langsung. Kehadiran media sosial juga memudahkan akses bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan informasi politik, sehingga lebih mudah untuk mengakses berita dan pendidikan tentang demokrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Prasetyo (2021), media sosial telah menjadi alat komunikasi politik yang jitu dalam mendorong partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi publik dengan lebih transparan. Informasi terkait pemilu, kebijakan pemerintah, dan isu-isu sosial dapat disebarkan dengan cepat, sehingga masyarakat lebih memahami situasi politik yang sedang berlangsung. Ini mendorong terbentuknya kontrol sosial terhadap pemerintah karena masyarakat dapat memberikan kritik atau dukungan secara terbuka. Penelitian oleh Sari dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa media sosial mampu memperkuat praktik demokrasi digital melalui penyampaian informasi yang terbuka dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, selain keuntungan yang ada, media sosial juga membawa dampak negatif bagi demokrasi, terutama terkait dengan penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Berita palsu yang beredar di platform media sosial sering kali dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemikiran publik dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Situasi ini dapat merusak kualitas demokrasi sebab masyarakat kesulitan dalam memilah informasi yang akurat dan yang menyesatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Rahmawati (2023) mengungkapkan bahwa penyebaran berita hoaks di media sosial menjadi ancaman nyata bagi demokrasi karena dapat menimbulkan polarisasi politik sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media. Selain berita palsu, platform media sosial juga dapat menyebabkan polarisasi dalam politik karena algoritma yang hanya menampilkan informasi sesuai dengan preferensi penggunaannya. Akibatnya, individu lebih cenderung untuk terkurung dalam kelompok yang memiliki pandangan politik yang sejalan dan kurang bersedia menerima perspektif yang berbeda. Fenomena ini dapat menurunkan kualitas diskusi yang sehat dalam proses demokrasi dan meningkatkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Penelitian oleh Lestari (2024) mengungkapkan bahwa pemakaian media sosial yang berlebihan dalam konteks politik dapat memperkuat

sikap fanatisme dan memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan kritis dalam kehidupan demokratis.

### **polarisasi dan disinformasi**

Media sosial, meskipun memiliki berbagai keuntungan, juga turut berperan dalam memecah belah masyarakat dengan mempertegas perbedaan pendapat dan meningkatkan ketegangan sosial. Informasi yang salah di platform media sosial cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan berita yang valid. Ini terjadi karena berita palsu sering kali lebih dramatis dan menarik perhatian, sehingga lebih mudah menjadi viral. Penyebarluasan informasi yang tidak benar ini dapat memperkuat kecenderungan bias konfirmasi, di mana orang mencari dan lebih percaya informasi yang selaras dengan pandangan mereka, sambil mengabaikan atau menolak informasi yang berlawanan. Akibatnya, komunitas menjadi semakin terpisah dan sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu penting. Pemisahan ini dapat mengganggu kestabilan sosial, karena menambah ketidakpercayaan di antara berbagai kelompok dan memicu perselisihan. Oleh karena itu, walaupun media sosial bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam politik, efek negatifnya terhadap kekompakan sosial tidak boleh diabaikan (Retavia, 2025). Dalam kerangka kehidupan suatu negara, perbedaan pendapat tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi serta kebebasan dalam mengungkapkan pikiran yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Platform media sosial juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara luas tanpa batasan waktu dan tempat. Namun, kebebasan ini sering kali tidak didukung oleh tingkat kemampuan literasi digital yang seharusnya. Hal ini menyebabkan media sosial berfungsi sebagai medan pertarungan pandangan yang dipenuhi oleh ujaran kebencian, disinformasi, dan fitnah yang memperdalam perpecahan. Cara interaksi digital yang ditentukan oleh algoritma semakin memperkuat fenomena filter bubble, di mana pengguna hanya mendapatkan informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Sebagai hasilnya, ruang publik digital menjadi terfragmentasi dan kehilangan keseimbangan dalam penyajian informasi yang bersifat objektif (Anggraini Irma, 2025).

### **upaya mengatasi polarisasi**

Polarisasi di platform media sosial menjadi sebuah tantangan signifikan bagi kehidupan demokrasi karena berpotensi menyebabkan konflik sosial, menyebarkan kebencian, dan melemahkan persatuan masyarakat. Dengan demikian, salah satu langkah yang dapat diambil untuk menangani polarisasi adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital. Literasi digital memfasilitasi masyarakat untuk memilah informasi, mengenali berita palsu, dan menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana dan kritis. Dengan keterampilan ini, masyarakat dapat terhindar dari provokasi akibat informasi yang bersifat manipulatif atau provokatif. Penelitian oleh Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa literasi digital berkontribusi secara signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih kritis terhadap aliran informasi politik di platform media sosial, sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya polarisasi dalam era demokrasi digital.

Di samping literasi digital, upaya untuk meredakan polarisasi juga dapat dilakukan dengan memperkuat etika komunikasi di media sosial. Pengguna platform media sosial harus terbiasa untuk menghargai perbedaan pendapat dan menghindari penyebaran ujaran kebencian dalam diskusi yang berkaitan dengan politik. Demokrasi yang sehat memerlukan ruang untuk berdiskusi yang terbuka, sopan, serta menghargai beragam perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa penerapan etika komunikasi digital dapat menciptakan interaksi politik yang lebih konstruktif dan menurunkan ketegangan antar kelompok di media sosial. Dengan cara ini, budaya komunikasi yang positif dapat memperkuat persatuan dalam tatanan demokrasi.

Keterlibatan pemerintah dan platform media sosial juga sangat krusial dalam mengatasi masalah polarisasi. Salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan memperketat pengawasan terhadap penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, serta konten provokatif yang dapat memecah masyarakat. Selain itu, platform media sosial dituntut untuk meningkatkan transparansi algoritma sehingga pengguna tidak terbatas hanya menerima informasi yang lebih sesuai dengan pandangan politik mereka. Menurut penelitian Pratama (2023), diperlukan adanya regulasi digital serta pengawasan terhadap platform media sosial demi menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih baik dan mengurangi penyebaran informasi yang dapat memicu polarisasi dalam politik. Upaya lain yang tak kalah penting adalah mendorong interaksi dan kerja sama diantara kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik yang beragam. Diskusi yang transparan dan didasarkan pada fakta dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami perspektif yang berbeda, sehingga bisa mengurangi sikap ekstrem dalam politik. Pendidikan tentang demokrasi juga harus diperkuat agar masyarakat menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari sistem demokrasi, bukan alasan untuk saling membenci. Penelitian Lestari (2024) mengungkapkan bahwa dialog publik dan pendidikan demokrasi yang menjunjung nilai toleransi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi polarisasi sosial di era digital ini. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan platform media sosial sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

## **Kesimpulan dan Saran**

Media sosial memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia, baik positif maupun negatif. Adanya media sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik karena menyediakan platform yang lebih leluasa untuk mengungkapkan pendapat, berdialog, dan mendapatkan informasi politik dengan cepat dan mudah. Media sosial juga berperan dalam mendorong keterlibatan generasi muda dalam demokrasi melalui berbagai kegiatan digital seperti kampanye sosial, pengawasan pemilu, dan distribusi informasi politik. Dengan cara ini, media sosial dapat memperkuat praktik demokrasi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Namun, di balik keuntungan tersebut, media sosial membawa sejumlah tantangan bagi demokrasi, terutama dalam hal penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, propaganda politik, dan polarisasi sosial.

Distribusi informasi yang tidak akurat bisa mempengaruhi pendapat publik dan memicu pertikaian antar kelompok sosial. Selain itu, algoritma di media sosial sering kali mempertegas

perbedaan pandangan politik, sehingga memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak diawasi dan tanpa kesadaran digital dapat menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas demokrasi. Karenanya, perlu dilakukan berbagai usaha untuk menangani dampak negatif media sosial, seperti meningkatkan kemampuan literasi digital, memperkuat etika dalam berkomunikasi, memperketat pemantauan terhadap penyebaran informasi yang salah, dan meningkatkan pendidikan demokrasi dalam masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta platform media sosial sangat diperlukan untuk membangun ruang digital yang sehat dan mendukung praktik demokrasi yang baik. Melalui penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab, media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, Irma.(2025). Tantangan demokrasi di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi. Dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan. *Maliki interdisciplinary journal(MIJ)*. Volume(3). 3. (n.d.).
- Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2021). "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2), 120–132.
- Fauzi, M., & Rahmawati, L. (2023). "Hoaks Politik di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(3), 89–101.
- Indrawan, J., & Ilmar, A. (2021). *Media Sosial dan Partisipasi Politik Masyarakat di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lestari, P. (2024). "Polarisasi Politik dalam Penggunaan Media Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 34–46.
- Masyita, ruhi.(2025). dampak media sosial bagi demokrasi. *Maliki interdisciplinary journal(MIJ)*. Volume(3). 3.
- Munzir, A., Asmawi, M., & Zetra, A. (2019). "Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Generasi Muda." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 50–60.
- Nasrullah, R. (2021). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Jakarta: Kencana.
- Pratama, D., & Hidayat, M. (2023). "Dampak Hoaks dan Polarisasi Politik di Media Sosial terhadap Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(1), 67–75.
- Rahman, F. (2024). "Literasi Digital dan Tantangan Demokrasi di Era Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(1), 21–30.
- Retavia, putri.(2025). Dampak media sosial terhadap transformasi sosial dan politik di era digital. *Maliki interdisciplinary journal(MIJ)*. Volume(3). 3.
- Sari, N., & Kurniawan, R. (2022). "Demokrasi Digital dan Transparansi Informasi di Era Media Sosial." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 55–67.

Setiawan, A. (2022). "Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Generasi Muda di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 5(2), 45-53.